

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)  
TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN TRIPA  
MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA**

**Juhari,**

**Ela Yunita**

*Prodi Manajemen Dakwah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*

*<juhari.hasan@ar-raniry.ac.id>*

*<ellayunita04@gmail.com>*

**Abstrak:** *Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberi bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin, sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Program ini menyeluruh di Indonesia termasuk di Provinsi Aceh Kecamatan Tripa Makmur. Kajian ini dilakukan untuk melihat efektifitas dari penerapan program PKH dalam masyarakat. Kajian ini juga ingin mengetahui hak dan kewajiban penerima PKH, strategi implementasi PKH dalam penanggulangan kemiskinan, serta bagaimana program bantuan PKH tersalurkan menyeluruh di Kecamatan Tripa Makmur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, jenis penelitian ini adalah (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya masyarakat merasa terbantu dengan adanya bantuan dari PKH, masyarakat juga memenuhi hak dan kewajiban sebagai penerima bantuan PKH walaupun belum sepenuhnya terlaksana dengan sempurna, dan bantuan untuk saat ini juga sudah tersalurkan dan diterima dengan baik oleh penerima bantuan, walaupun belum menyeluruh karna masih adanya penerima yang tidak tepat sasaran yang diakibatkan oleh keterlambatan dalam mengupdate data. Perlu adanya data yang kongkrit dan update dalam penyaluran PKH kepada peserta sehingga tepat sasaran dan memanfaatkan sebaik mungkin bantuan yang diberikan sehingga menjadi keluarga yang lebih sejahtera.*

**Kata Kunci:** *Efektifitas, Implementasi, Bantuan PKH, Kecamatan Tripa Makmur*

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan adalah masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Keadaan kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan, dan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.<sup>1</sup> Secara absolut tidak ada keharusan bahwa dalam suatu masyarakat ada kelompok masyarakat yang dinyatakan miskin.

---

<sup>1</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memandu Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, Cet-1, 1996) hlm. 234.

Sedangkan secara relatif mudah dimengerti karna dalam suatu masyarakat selalu ada kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin. Memang kedua masalah kemiskinan tersebut semuanya penting. Kemiskinan absolut sebaiknya terlebih dahulu diperangi atau dihapuskan karna hal ini mencakup kehidupan dasar yang layak. Paling tidak manusia harus hidup pas-pasan, tetapi dalam kenyataannya banyak anggota masyarakat yang hidup tetapi dibawah pas-pasan (*subsistence*) yang dalam hal ini kita sebut sebagai garis kemiskinan. Sedapat mungkin tidak ada kemiskinan relatif, maka dalam suatu masyarakat terdapat apa yang disebut sebagai keadilan atau pemerataan. Maka dari itu kemiskinan belum pernah lepas seluruhnya dari bumi indonesia.<sup>2</sup>

Pemerintah terus berupaya menanggulangi kemiskinan dan sekaligus memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya, diperlukan upaya untuk memadukan berbagai kebijaksanaan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor dan wilayah. Program pembangunan sektoral yang secara tajam diarahkan pada masyarakat miskin dapat dipandang sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar antara lain pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.<sup>3</sup> Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang sejak tahun 2007 telah dilaksanakan untuk memberi perlindungan sosial bagi Keluarga Miskin (KM). Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial bersyarat, dalam jangka PKH diharapkan mampu membantu Keluarga Miskin mengurangi beban pengeluaran. Pada jangka menengah PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan peserta dalam mengakses layanan kesehatan sosial sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.<sup>4</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan secara berkelanjutan yang sejak tahun 2007 di 7 provinsi hingga tahun 2018, PKH sudah dilaksanakan di 34 provinsi dan mencakup 512 Kabupaten/Kota dan 7.214 Kecamatan.<sup>5</sup> Salah satu kecamatan yang menerima program ini adalah kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya. Kajian ini mencoba menelusuri aspek efektivitas dari penyaluran dan penerapan program ini dalam masyarakat serta

---

<sup>2</sup> M. Suparmoko, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: CV Andi Offset, Ed, 1, 2002), hlm. 196.

<sup>3</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memandu Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: PT.Pustaka Cidesindo, Cet-1, 1996) hlm. 243.

<sup>4</sup> Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaa Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2019).

<sup>5</sup> Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaa Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2019), hlm. 24.

menelusuri dampak yang ada dalam masyarakat terkait dari program yang dijalankan ini oleh pemerintah. Maka kajian ini akan menelusuri terkait efektifitas PKH dalam masyarakat di Kecamatan Tripa Makmur Nagan Raya.

## **SEKILAS TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)**

PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.<sup>6</sup> Rendahnya tingkat penghasilan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) membuat rendahnya tingkat pendidikan sehingga mengharuskan anak-anak bekerja di usia muda, serta buruknya tingkat kesehatan khususnya ibu dan proses tumbuh kembang anak balita, yang akan menjadikan kondisi miskin berkepanjangan. Dengan demikian, sistem perlindungan sosial diharapkan dapat membantu tingkat kehidupan RTSM dengan berbagai persyaratan, sekaligus untuk mendidik masyarakat miskin agar disiplin, mau berupaya untuk hidup pada tingkat yang lebih baik.<sup>7</sup>

Adapun dalam proses pelaksanaan PKH, penetapan Calon Penerima PKH memiliki beberapa tahapan yakni (Perencanaan, penetapan Calon Peserta PKH, persiapan daerah, pertemuan awal dan validasi, penetapan keluarga penerima manfaat PKH, penyaluran bantuan, pendampingan, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), verifikasi komitmen, pemutahiran).<sup>8</sup>

### **Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan PKH**

Ada beberapa hal yang menjadi hak penerima PKH, yaitu: menerima bantuan sosial, pendampingan social, pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan social dan program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.<sup>9</sup>

Adapun yang menjadi kewajibannya, antara lain anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0-6 tahun, anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, serta anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam

---

<sup>6</sup> Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2019), hlm. 9.

<sup>7</sup> Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2012), hlm. 128.

<sup>8</sup> Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2019), hlm. 48.

<sup>9</sup> Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2019), hlm. 27.

puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat dan KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.

Pemenuhan kewajiban oleh KPM PKH akan berdampak pada bantuan sosial dan hak kepesertaan lainnya. KPM yang memenuhi kewajibannya akan mendapatkan hak sesuai ketentuan program. Sedangkan KPM yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan penangguhan dan/atau penghentian bantuan sosial.<sup>10</sup> Terkait dengan program kerja PKH terdapat beberapa program yang diselenggarakan dalam PKH, yaitu (Program Bantuan Komplementer, Jaminan Kesehatan Nasional, Bansos Rastra, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), Asistensi Lanjut Usia Terlantar (Aslut), Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), dan Sertifikat Kepemilikan Tanah (Badan Pertanahan Nasional).<sup>11</sup>

## **KONSEP KEMISKINAN**

### **Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Bentuk-bentuk kemiskinan yang ada di Indonesia serta berbagai ragam faktor penyebabnya, tentunya sangat mempengaruhi rumusan kebijakan yang dibuat. Berbagai kebijakan dan program yang ada dirasakan masih kurang efektif dalam upaya menurunkan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, hal ini terbukti dengan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin dari masa ke masa.<sup>12</sup> Kemiskinan selalu faktual di setiap tempat dan zaman baik di perkotaan maupun di pedesaan, zaman penjajahan maupun saat ini kemiskinan sulit untuk dihapuskan bahkan sampai pada tingkat “*zero point*”. Masalah kemiskinan pun telah menjadi isu di tingkat global, nasional dan lokal. Singkatnya jika tingkat kemiskinan masih tinggi hal itu menjadi cermin kegagalan pembangunan suatu bangsa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Budaya miskin merujuk pada karakteristik mental dan perilaku orang miskin itu sendiri. Masyarakat pedesaan di Indonesia yang berjumlah 14,17% (BPS, Maret 2014) pun juga lekat dengan label budaya miskin seperti malas bekerja keras, tidak punya visi dimasa depan, menganggap pendidikan itu tidak penting, masih percaya pada hal-hal mistis, terlalu nyaman

---

<sup>10</sup> Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2019), hlm. 28.

<sup>11</sup> Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2019), hlm. 35.

<sup>12</sup> Nunung Nurwati, *Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan, dan Alternatif Kebijakan*, *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol 10 No 1, 2008. <https://jurnal.unpad.ac.id/kependudukan/article/view/doc1>.

dengan kondisi yang ada dan tidak mempunyai semangat untuk berprestasi.<sup>13</sup>

### **Strategi Penanggulangan Kemiskinan**

Kemenangan dan dominasi diskursus kemiskinan produksi ditunjukkan oleh lembaga donor dan pemerintah dalam melembagakan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) , KPK (Komisi Penanggulangan Kemiskinan), hingga mengganti pendamping orang miskin dari LSM menjadi konsultan swasta. Hal ini kemudian menimbulkan kecurigaan apakah diskursus kemiskinan produksi yang berorientasi pada peningkatan profit mampu mengurangi kemiskinan. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan peningkatan dan perluasan program penanggulangan kemiskinan dari tahun 2010-2012 yang terbagi dalam 4 klaster. Klaster 1 yaitu Beasiswa Miskin, Jamkesmas, Beras untuk rakyat miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Klaster I yaitu PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), Klaster III dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Klaster IV diantaranya berupa Program Rumah Murah serta Air Bersih untuk rakyat. Semua program ini dilaksanakan dari lapisan rumah tangga miskin dan sangat miskin.<sup>14</sup>

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) sebagai pendukung dalam perolehan data maka juga digunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Lokasi penelitian dilakukan pada 3 (tiga) desa yaitu desa Kabu, desa Neubok yee, dan desa Pantan Pange Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya. Data-data yang dikumpulkan untuk menunjang penelitian ini dikumpulkan dengan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>15</sup> Semua data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi akan di pilah sesuai dengan substansi dan data yang relevan dengan kajiannya dan kemudian menganalisis semua data yang sesuai dan dibuat kesimpulan yang kemudian menjadi data valid dalam merumuskan hasil kajian yang diperoleh sebagai substansi kajian penelitian ini.

---

<sup>13</sup> Muhammad Zid dan Ahmad Tarmiji Alkhudri, *Sosiologi Pedesaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet-1, 2016) hlm. 89.

<sup>14</sup> Muhammad Zid dan Ahmad Tarmiji Alkhudri, *Sosiologi Pedesaan, ...*, hlm. 94-96.

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2005), hlm. 248.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Bantuan PKH Kecamatan Tripa Makmur**

Hak merupakan sesuatu yang patut dan wajar untuk diterima oleh seseorang atau suatu organisasi dengan berbagai ketentuan atau peraturan yang sudah disepakati bersama, berikut beberapa hak penerima PKH berdasarkan data yang sudah dianalisa:

#### **1. Menerima Bantuan Sosial**

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Muhammad Isa sebagai pendamping PKH mengatakan bahwa Penerima PKH berhak menerima segala bantuan dari pemerintah baik itu berupa bantuan pangan non tunai (BPNT), pemberian rumah tidak layak huni, gas subsidi, Listrik subsidi, dan bantuan sosial lainnya yang berasal dari pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Dilanjutkan oleh ibu Nurul Khalimah sebagai penerima bantuan PKH dari Desa Kabu, juga mengatakan hal yang sama bahwa beliau mendapatkan bantuan berupa sembako seperti beras dan telur setiap bulannya, uang tunai setiap 3 bulan sekali, dan bantuan lainnya dari desa dan pemerintah.<sup>16</sup>

Selanjutnya wawancara dengan ibu Maida Sri Dewi sebagai penerima bantuan PKH dari Desa Pantan Pange, mengatakan bahwa bantuan sosial yang diterima berupa sembako seperti beras dan telur yang diambil dengan menggunakan kartu kombo elektronik, bantuan uang tunai setiap 3 bulan sekali yang juga diambil dengan menggunakan kartu yang diberikan kepada setiap penerima PKH, dan bantuan lain seperti BLT (bantuan langsung tunai) yang diberikan dari Desa.<sup>17</sup> Selanjutnya wawancara dengan ibu Malayanti sebagai penerima bantuan PKH dari Desa Pantan Pange, mengatakan bahwa bantuan yang diterima berupa BPNT atau yang disebut dengan bantuan pangan non tunai yaitu berupa uang tunai, sembako seperti beras dan telur, saya juga mendapatkan BLT (bantuan langsung tunai) yang berasal dari dana Desa.<sup>18</sup>

#### **2. Pendampingan Sosial**

Dari hasil wawancara dengan bapak Muhammad Isa sebagai pendamping PKH tugas saya yaitu melakukan pertemuan kelompok 1 kali setiap bulan dengan penerima PKH dari masing-masing desa, yaitu Desa Kabu, Desa Neubok Yee PP dan Desa Pantan Pange. Selanjutnya wawancara dengan Ibu Ainul Marziah sebagai penerima PKH dari Desa Pantan Pange, dalam pertemuan pendampingan sosial saya mendapatkan pemahaman pemahaman yang sangat bermanfaat seperti pentingnya pendidikan bagi anak, mengenai kesehatan, dan

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Nurul Khalimah, Penerima Program Keluarga Harapan Kecamatan Tripa Makmur, tanggal 9 Desember 2020.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Maida Sri Dewi, Penerima Program Keluarga Harapan Kecamatan Tripa Makmur, tanggal 17 Desember 2020.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Malayanti, Penerima Program Keluarga Harapan Kecamatan Tripa Makmur, tanggal 17 Desember 2020.

pentingnya pengelolaan keuangan dalam keluarga.<sup>19</sup>

Selanjutnya wawancara dengan ibu Nurlaili sebagai penerima bantuan PKH dari Desa Kabu, mengatakan bahwa dalam pertemuan pendampingan sosial saya mendapatkan arahan arahan dan motivasi motivasi untuk bisa berfikir lebih maju, dan juga mendapatkan pemahaman berupa pentingnya pendidikan bagi anak anak, dan pentingnya menjaga kesehatan bagi diri saya dan keluarga.<sup>20</sup> Selanjutnya wawancara dengan ibu Suriyati sebagai penerima bantuan PKH dari Desa Neubok Yee PP, mengatakan bahwa dalam pertemuan pendampingan sosial saya menjadi lebih banyak tau tentang pemahaman pemahaman penting mengenai pendidikan, kesehatan dan juga motivasi untuk menjadi lebih maju dalam berfikir.<sup>21</sup>

### **3. Pelayanan Fasilitas Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial.**

Dari hasil wawancara setiap penerima PKH berhak mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan bagi anak anak sekolah dan kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi penerima yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 tahun/penyandang disabilitas berat. Menurut hasil wawancara dengan ibu Riska Hayati sebagai penerima PKH dari Desa Kabu, mengatakan bahwa setiap sebulan sekali adanya posyandu dan pemeriksaan kesehatan untuk semua penerima PKH, saya membawa anak anak saya untuk memeriksa kesehatan ke posyandu yang di adakan di Desa, selain memeriksa kesehatan anak-anak saya juga bisa memeriksa kesehatan saya sendiri. PKH dapat membantu keluarga saya terutama dalam pendidikan anak saya, dengan adanya PKH maka keperluan sekolah bisa terpenuhi tanpa harus memakai lagi biaya dari hasil bekerja sehari-hari, setelah mendapat bantuan dari PKH saya merasa lebih terbantu dalam ekonomi karna untuk biaya pendidikan sudah ada bantuan dari PKH.<sup>22</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan nenek Wirdah sebagai Lansia penerima bantuan PKH dari Desa Pantan Pange juga mengatakan bahwa dengan adanya PKH saya merasa terbantu karna dengan bantuan dari PKH saya bisa memeriksa kesehatan dengan gratis, dan dengan bantuan uang dari PKH saya bisa memenuhi kebutuhan saya seperti membeli obat obatan ketika saya sakit, dan bantuan lainnya dari PKH juga memberikan banyak manfaat bagi saya.<sup>23</sup> Secara umum hak dalam bentuk bantuan sudah sangat baik tersalurkan kepada penerima

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Ainul Marziah, Penerima Program Keluarga Harapan Kecamatan Tripa Makmur, tanggal 17 Desember 2020.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Nurlaili, Penerima Program Keluarga Harapan Kecamatan Tripa Makmur, tanggal 9 Desember 2020.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Suriyati, Penerima Program Keluarga Harapan Kecamatan Tripa Makmur, tanggal 10 Desember 2020.

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Riska Hayati, Penerima Program Keluarga Harapan Kecamatan Tripa Makmur, tanggal 9 Desember 2020.

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Wirdah, Penerima Program Keluarga Harapan Kecamatan Tripa Makmur, tanggal 17 Desember 2020.

PKH di Kecamatan Tripa Makmur ini. Dimana hampir seluruh penerima PKH merasakan keringanan dalam perekonomian.

### **Strategi Implementasi PKH dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Tripa Makmur**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Faturrahman selaku koordinator PKH Nagas Raya, program PKH adalah program nasional yang memang untuk sementara ini pemerintah pusat ataupun pemerintah kabupaten kota, ini adalah satu langkah program yang direncanakan oleh pemerintah yang paling efektif sekarang, telah dibuktikan oleh berbagai macam wilayah provinsi di kabupaten kota termasuk di Kabupaten Nagas Raya, mengapa dikatakan efektif karna program pkh ini berbeda dengan program lainnya. Program penanggulangan yang dilakukan oleh PKH ada pendampingannya itu yang pertama, dan strategi yang dilakukan yaitu :

#### **1. Edukasi**

Edukasi yang dilakukan oleh teman teman pendamping PKH di lapangan, baik itu berupa pertemuan kelompok ataupun yang disebut sekarang dengan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ada berbagai macam modul yang disampaikan oleh teman-teman pendamping yaitu ada sekitar 5 modul dan terdiri dari 14 sesi dan salah satunya yaitu kesehatan dan gizi, modul perlindungan anak, ekonomi atau keuangan. 14 sesi tersebut yang harus disampaikan pada ibu ibu penerima PKH dan ibu ibu penerima PKH juga harus menyampaikan kepada suami yang memiliki suami dan yang memiliki anak sekolah, dan mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh teman-teman pendamping itu kepada yang menjadi keluarganya sendiri.

#### **2. Verifikasi**

Selanjutnya penerima PKH juga melakukan verifikasi di sekolah dan di layanan kesehatan. Verifikasi bertujuan untuk melihat efektivitas kehadiran anak didik PKH yang hadir ke sekolah. Kami berharap anak PKH itu harus hadir 85% di sekolah, ketika itu tidak mencapai 85% maka akan diberikan sanksi bisa saja itu dilakukan pemotongan dari pusat ataupun terlalu berturut turut tidak komitmen dan tidak hadir maka akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH.

#### **3. Advokasi**

Advokasi bantuan PKH kerjasamakan dengan pemerintah daerah, contoh mungkin bagi ibu-ibu yang mempunyai usaha usaha kecil menengah kita juga bisa mensupport dengan web atau kube (kelompok usaha bersama) dana dari provinsi atau dari Kabupaten

kota untuk meningkatkan ekonomi produktif rumah tangga ibu ibu, setidaknya setelah mereka mendapatkan bantuan PKH maka akan dilakukan pendampingan oleh teman teman pendamping, kita juga berharap pada pemerintah daerah untuk mendukung program ini, sistemnya gotong royong agar ibu ibu cepat meningkat mandiri dan keluar dari kepesertaan PKH.

#### **4. Graduasi**

Tujuan PKH targetnya graduasi bisa keluar dari kepesertaan PKH, PKH sudah melakukan graduasi dan tahapan graduasi sudah mulai dari 2018, maksud graduasi ini di keluarkan dari kepesertaan PKH, graduasi bisa dilakukan karena memang penerima PKH mengundurkan diri karna sudah merasa mampu dan sejahtera secara ekonomi, graduasi juga dilakukan secara paksa karna memang faktanya mampu dan tidak dapat juga dibiarkan makanya dilakukannya graduasi tersebut.

#### **5. Bekerjasama dengan Pemerintah**

Langkah strategi yang di implementasikan oleh Program PKH ini yaitu bekerjasama dengan pemerintah daerah karena penerapan ini jika tidak bekerjasama dengan pemerintah daerah maka akan sulit dilaksanakan. Langkah langkah ini sudah dilakukan dan disinkronkan dengan kegiatan kegiatan rencana kerja di daerah terutama Dinas Sosial, kita juga melakukan koordinasi dengan Bappeda, dan kita juga pernah melakukan koordinasi dengan Baitul Mal, bagi penerima PKH yang belum ada rumah maka bisa di koordinasikan, jika ada bantuan bantuan dari daerah maka bisa kita sinkronkan dengan kegiatan PKH. Ada beberapa capaian juga yang kita lakukan dalam kegiatan ini, salah satu contoh juga telah melakukan koordinasi dengan pihak Reaksos, jadi reaksos ini mempunyai kegiatan penerima bantuan seperti kursi roda, tongkat, dan sebagainya.

### **Efektifitas Program Bantuan PKH di Kecamatan Tripa Makmur**

Program PKH terintegrasi dengan pusat sehingga proses penyaluran dilakukan secara sistematis langsung dari pusat. Menurut Muhammad Isa, bantuan PKH itu ada di setiap daerah di seluruh Indonesia dan otomatis sampai ke desa-desa dan seluruh kecamatan ada penerimanya, dan tidak semua masyarakat menerima bantuan PKH. Tetapi bantuan PKH ini di peruntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu dan memenuhi syarat dan terdaftar di dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial).<sup>24</sup> Bantuan yang telah disalurkan ke Desa Kabu, Desa Neubok Yee PP, dan Desa Pantan Pange sudah menyeluruh diterima oleh seluruh anggota PKH.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Muhammad Isa, Pendamping PKH Desa Kabu, Desa Neubok Yee dan Desa Pantan Pange. tanggal 29 November 2020.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PKH juga menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam pengurangan kemiskinan, apabila penyaluran PKH berhasil tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu maka besar manfaat yang dirasakan oleh keluarga-keluarga kurang mampu.

Dalam program PKH, pendampingan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sangatlah penting, karena sebagian besar KPM tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk memperjuangkan hak mereka. Untuk itu KPM membutuhkan pendamping yang akan membantu mereka untuk mendapatkan hak dan kewajibannya dalam program PKH ini. Pendamping PKH juga merupakan ujung tombak dalam program ini sebab cukup banyak kegiatan yang wajib dilakukan oleh seorang pendamping. Mulai dari sosialisasi ditingkat kecamatan, melakukan pertemuan awal, melakukan pertemuan kelompok dan bimbingan kepada KPM, melakukan pemutakhiran data, melakukan verifikasi, menyalurkan seluruh bantuan kepada KPM, mendampingi KPM ke fasilitas kesehatan dan pendidikan hingga melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Begitulah upaya PKH berperan dalam mengentaskan kemiskinan ditengah masyarakat. Dengan berbagai upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh pendamping maka seluruh bantuan akan menyeluruh didapatkan oleh anggota PKH.<sup>25</sup> Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mawardi AB selaku Keuchik Gampong Neubok Yee PP, mengatakan bahwa selama adanya PKH masyarakat Desa mengalami peningkatan ke yang lebih baik, dan selama adanya PKH angka kemiskinan di Desa juga mengalami pengurangan karna adanya bantuan dari PKH dan juga bimbingan dari pendamping PKH sendiri yang membimbing penerima penerima PKH untuk merubah pola pikir masyarakat dengan memanfaatkan bantuan bantuan dari PKH dengan baik agar kedepannya bisa lebih berkembang. Untuk manfaat yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin melalui PKH sudah menyeluruh kelapisan masyarakat atau belum, bisa dibilang belum menyeluruh atau belum merata, tapi kalau yang sesuai data maka sudah merata.<sup>26</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mahdani selaku Keuchik Gampong Pantan Pange, mengatakan bahwa manfaat PKH lebih cenderung bagi anak anak yang berasal dari keluarga miskin tidak mengalami putus sekolah, anak anak juga bisa belajar dengan baik, dan bagi kaum lansia yang menerima bantuan PKH juga bisa memanfaatkan bantuan untuk pengobatan, untuk masyarakat miskin yang mengalami disabilitas juga

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Muhammad Isa, Pendamping PKH Desa Kabu, Desa Neubok Yee dan Desa Pantan Pange. tanggal 29 November 2020.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mawardi, keuchik gampong Neubok Yee PP, tanggal 26 November 2020.

merasakan manfaat yang besar karena dengan adanya PKH maka masyarakat disabilitas ini mendapatkan bantuan seperti kursi roda, tongkat, dan bantuan lainnya yang bisa lebih memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan dalam segi ekonomi juga semakin baik, dan pendidikan bagi anak-anak juga sudah terjamin selama menerima bantuan dari PKH, jadi bisa dibayangkan angka kemiskinan menurun selama adanya PKH.<sup>27</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Darmisar selaku keuchik Gampong Kabu mengatakan bahwa untuk saat ini bisa dikatakan bantuan dari pemerintah melalui program PKH sudah lebih merata didapatkan oleh keluarga-keluarga miskin, bantuan yang diberikan melalui program PKH bisa saya katakan sangat membantu keluarga-keluarga yang tidak mampu dan yang saya ketahui ada beberapa bentuk bantuan yang diberikan oleh program PKH contohnya seperti bantuan di bidang kesehatan, bidang pendidikan, bantuan pangan non tunai seperti sembako, bantuan uang tunai bagi masyarakat lanjut usia dan penyandang disabilitas berat.

Program PKH ini berpengaruh bagi angka kemiskinan di Desa, dengan adanya bantuan-bantuan dari program PKH maka besar manfaat yang dirasakan oleh keluarga-keluarga yang kurang mampu, mereka merasa sangat terbantu dengan bantuan-bantuan yang diberikan, dan memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu angka kemiskinan pun menurun dan pemikiran masyarakat pun lebih maju dengan adanya bimbingan-bimbingan yang diberikan oleh pendamping PKH.<sup>28</sup>

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di tiga Desa Kecamatan Tripa Makmur yaitu Desa Pantan Pange, Desa Kabu, Desa Neubok Yee PP sudah berjalan dengan cukup baik. Peran PKH dapat membantu mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kecamatan Tripa Makmur, dengan adanya bantuan dari PKH banyak anak-anak yang tidak putus sekolah, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa PKH berperan penting dalam bidang pendidikan. Penerima bantuan PKH bisa dikatakan juga termasuk sudah memenuhi hak dan kewajibannya sebagai anggota PKH. Strategi yang dilakukan oleh PKH dalam penanggulangan kemiskinan juga sudah cukup berjalan baik walaupun belum sempurna karena masih ada penerima yang tidak tetap sasaran diakibatkan oleh data yang tidak update. Bantuan yang telah disalurkan ke Desa Kabu, Desa Pantan Pange, dan Desa Neubok Yee PP sudah menyeluruh diterima oleh seluruh anggota PKH. Mengelola sesuatu tepat sasaran merupakan salah satu hal yang penting dalam mencapai sebuah tujuan termasuk dalam hal pengelolaan

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mahdani, keuchik gampong Pantan Pange, tanggal 1 Januari 2021.

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Darmisar, keuchik gampong Kabu, tanggal 2 Desember 2020.

PKH, baik pengurus maupun penerima. Apabila dilaksanakan dengan baik maka ganjarannya akan mendapatkan balasan yang baik pula. Penerima PKH akan semakin terlatih dan terprosedur dalam penggunaan bantuan yang akan berimbas pada kesejahteraan hidupnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Diaskara, Rizki Rigeras Aldzuhri Diaskara. *“Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan(PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2019”*, Universitas Pancasakti Tegal, 2021.
- Ginandjar Kartasasmita. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memandu Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: PT.Pustaka Cidesindo, Cet-1, 1996.  
<http://jurnal.unpad.ac.id/kependudukan/article/download/doc1/2434>
- Kementerian Sosial RI. *Pedoman Pelaksanaa Program Keluarga Harapan (PKH)*, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2019.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakrya, 2005.
- Muhammad Zid dan Ahmad Tarmiji Alkhudri. *Sosiologi Pedesaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet-1, 2016.
- Pratiwi, Desi. *“Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam”*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.
- Rahayu, Sri Lestari. *Bantuan Sosial di Indonesia*, Bandung: Fokusmedia, 2012.
- Rahmania. *“Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Saifuddin Jambi, 2020.
- Suparmoko. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, Ed, 1, 2002.
- wawancara dengan Nurul Khalimah, Penerima Program Keluarga Harapan Kecamatan Tripa Makmur, tanggal 9 Desember 2020.
- wawancara dengan Maida Sri Dewi, Penerima Program Keluarga Harapan Kecamatan Tripa Makmur, tanggal 17 Desember 2020.
- wawancara dengan Malayanti, Penerima Program Keluarga Harapan Kecamatan Tripa Makmur, tanggal 17 Desember 2020.
- wawancara dengan Ainul Marziah, Penerima Program Keluarga Harapan Kecamatan Tripa Makmur, tanggal 17 Desember 2020.
- wawancara dengan Nurlaili, Penerima Program Keluarga Harapan Kecamatan Tripa Makmur, tanggal 9 Desember 2020.
- wawancara dengan Suriyati, Penerima Program Keluarga Harapan Kecamatan Tripa Makmur, tanggal 10 Desember 2020.
- wawancara dengan Riska Hayati, Penerima Program Keluarga Harapan Kecamatan Tripa Makmur, tanggal 9 Desember 2020.
- wawancara dengan Wirdah, Penerima Program Keluarga Harapan Kecamatan Tripa Makmur, tanggal 17 Desember 2020.
- Wawancara dengan Muhammad Isa, Pendamping PKH Desa Kabu, Desa Neubok Yee dan Desa Pantan Pange. tanggal 29 November 2020.
- Wawancara dengan Bapak Mawardi, keuchik gampong Neubok Yee PP, tanggal 26 November

2020.

Wawancara dengan Bapak Mahdani, keuchik gampong Pantan Pange, tanggal 1 Januari 2021.

Wawancara dengan Bapak Darmisar, keuchik gampong Kabu, tanggal 2 Desember 2020.